



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/B);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/B);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/B);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 6/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/B);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/B);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/B);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/B);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/B);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/C);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 15/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/C);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 16/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/C);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/C);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 13/C);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 19/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/C);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 20/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/C);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 21/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/C);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 5/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 5/C);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 3/C);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 4/C);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/B);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 4/C);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 5/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 16/C);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 10/C);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 11/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 11/C);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/A);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/A);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 3/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah semula berjumlah Rp. 2.799.412.181.942,86 bertambah sejumlah Rp. 332.175.847.132,83 sehingga menjadi Rp. 3.131.588.029.075,69 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 2.649.412.181.942,86
b. Berkurang	Rp. <u>(6.766.951.025,47)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.642.645.230.917,39

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 2.799.412.181.942,86	
b. Bertambah	<u>Rp. 332.175.847.132,83</u>	
Jumlah Belanja setelah		
Perubahan	Rp. 3.131.588.029.075,69	
Defisit setelah Perubahan	Rp. (488.942.798.158,30)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 170.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 352.051.042.665,31</u>	
Jumlah Penerimaan setelah		
Perubahan	Rp. 522.051.042.665,31	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 13.108.244.507,01</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah		
Perubahan	Rp. 33.108.244.507,01	
Jumlah Pembiayaan netto setelah		
perubahan	Rp. 488.942.798.158,30	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah		
Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 439.126.607.188,86	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.933.546.575,53</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
setelah Perubahan	Rp. 443.060.153.764,39	
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 1.644.689.583.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (14.682.187.649,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan		
setelah Perubahan	Rp. 1.630.007.395.351,00	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 565.595.991.754,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.981.690.048,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah		
yang Sah setelah Perubahan	Rp. 569.577.681.802,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 113.971.500.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.875.700.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah		
Perubahan	Rp. 115.847.200.000,00	

- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 32.824.675.930,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>309.514.300,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 33.134.190.230,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.286.104.458,86 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>36.032.229,53</u> |
| Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 3.322.136.688,39 |
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 289.044.326.800,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.712.300.046,00</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 290.756.626.846,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 145.977.595.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | | |
| | Rp. | <u>145.977.595.000,00</u> |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.123.009.264.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 1.123.009.264.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 375.702.724.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(14.682.187.649,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 361.020.536.351,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 94.065.403.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 94.065.403.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi
- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 147.397.118.754,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(2.865.245.452,00)</u> |
| Jumlah Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 144.531.873.302,00 |

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 49.169.078.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 49.169.078.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 75.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>6.846.935.500,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 6.921.935.500,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 274.889.392.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 274.889.392.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.661.482.399.831,02 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>129.035.854.009,32</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 1.790.518.253.840,34 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.137.929.782.111,84 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>203.139.993.123,51</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 1.341.069.775.235,35 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.129.269.317.848,02 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>86.458.976.479,32</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 1.215.728.294.327,34 |
- b. Belanja Hibah
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 64.060.886.490,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>24.207.871.100,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 88.268.757.590,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.817.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.952.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 6.769.000.000,00 |

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp. 461.335.195.493,00
2) Bertambah	<u>Rp. 15.417.006.430,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp. 476.752.201.923,00
e. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Tidak Bertambah/Tetap	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 104.690.861.451,91
2) Bertambah	<u>Rp. 3.625.224.594,61</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 108.316.086.046,52
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 723.282.322.145,71
2) Bertambah	<u>Rp. 62.446.997.508,80</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 785.729.319.654,51
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 309.956.598.514,22
2) Bertambah	<u>Rp. 137.067.771.020,10</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 447.024.369.534,32

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:	
a. Penerimaan sejumlah	
1) Semula	Rp. 170.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 352.051.042.665,31</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 522.051.042.665,31
b. Pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.108.244.507,01</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 33.108.244.507,01
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1) Semula	Rp. 150.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 352.051.042.665,31</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 502.051.042.665,31

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	20.000.000.000,00
c. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	13.108.244.507,01
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah Perubahan	Rp.	13.108.244.507,01
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	20.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD.
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
- Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
- Lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah.
- Lampiran VIII : Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- Lampiran IX : Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.

- Lampiran X : Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya.
- Lampiran XI : Daftar Perubahan Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini.
- Lampiran XII : Daftar Perubahan Dana Cadangan Daerah.
- Lampiran XIII : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 21 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 6/A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 223-6/2019